

DILEMA KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHATANI TANAMAN PANGAN

Policy Dilemma and Development Challenge of Crop Farming Diversification

Gelar Satya Budhi

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

The objective of this paper is to discuss urgency and dilemma of farming diversification policy, analyze profile and pattern of diversification change in the agro-ecosystem of wetland and upland, and formulate strategic policy in accelerating diversification. Result of the discussion shows that diversification need to develop. However, diversification may not intensively developed; because the government is unconvinced that diversification implementation support or against rice self-sufficiency endeavor. Crop farming diversification significantly develops in upland in Java, while in wetland, in Java and out of Java, does not. Development of crop farming diversification requires appropriate strategy to avoid threat on rice self-sufficiency program. In wet land area of Java and out of Java, inter-season crop farming diversification is very important to develop, utilizing of rice season to cultivate soybean and corn, which is integrated with self-sufficiency program of the commodities. Meanwhile, in upland area, rice is the appropriate commodity to accelerate crop farming diversification, as it supports rice self-sufficiency. The government should fully support the program, starting from the preparation of high-yield varieties to marketing activities.

Key words : *policy, diversification, food crop, agro-ecosystem*

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini untuk membahas urgensi dan dilema kebijakan diversifikasi usahatani tanaman pangan, menganalisis profil dan pola perubahan diversifikasi pada agroekosistem lahan sawah dan lahan kering, dan merumuskan kebijakan strategis dalam mengakselerasi diversifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa diversifikasi usahatani dipandang perlu untuk terus dikembangkan. Namun demikian diversifikasi cenderung tidak berkembang, karena pemerintah khawatir bahwa diversifikasi akan mengancam upaya swasembada beras. Diversifikasi usahatani tanaman pangan secara signifikan hanya terjadi pada agroekosistem lahan kering di Jawa, sedangkan di lahan sawah, baik di Jawa maupun luar Jawa tidak berkembang. Pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan memerlukan strategi yang tepat, agar tidak bertentangan dengan upaya swasembada beras. Pada lahan sawah di Jawa dan di luar Jawa perlu dikembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan antar musim, yang memanfaatkan masa tidak menanam padi dengan mengembangkan tanaman kedelai dan jagung, diintegrasikan dengan program swasembada komoditas tersebut. Sementara itu pada lahan kering, padi merupakan komoditas yang tepat untuk mengakselerasi diversifikasi usahatani tanaman

pangan, karena sekaligus berfungsi mendukung swasembada beras. Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari penyediaan varietas unggul sampai dengan pemasaran.

Kata kunci : kebijakan, diversifikasi, tanaman pangan, agroekosistem

PENDAHULUAN

Diversifikasi usaha pertanian (termasuk berbagai jenis usahatani) merupakan salah satu program pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak Pelita I, melengkapi program intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. Masuknya diversifikasi usaha pertanian ke dalam program pembangunan, didasarkan pada hasil kajian bahwa diversifikasi usaha pertanian memiliki banyak keuntungan, khususnya bagi petani. Berkembangnya manfaat diversifikasi usaha pertanian terjadi sejalan dengan kajian yang dilakukan. Pada awalnya manfaat diversifikasi usaha pertanian didasarkan pada tiga faktor keuntungan seperti yang dikemukakan Siegler (1977) dalam Pakpahan (1989), yaitu meminimumkan risiko, menghindari akibat buruk dari fluktuasi ekonomi, dan sebagai sumber pertumbuhan baru. Dalam perkembangan selanjutnya, diversifikasi usaha pertanian terbukti memiliki keuntungan-keuntungan lainnya, di mana bukan saja dilihat dari faktor ekonomi tetapi juga lingkungan. Didasarkan pada keuntungan-keuntungan tersebut, Rao *et al.* (2004) berpendapat bahwa diversifikasi usaha pertanian dapat dijadikan sebagai strategi untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, konservasi lingkungan, dan peningkatan pendapatan usahatani melalui penggunaan yang lebih baik dari sumberdaya yang tersedia (Rao *et al.*, 2004).

Kendati demikian, untuk mencapai keuntungan-keuntungan tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang memerlukan komitmen kuat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Barghouti *et al.* (1992) menyatakan bahwa keberhasilan program diversifikasi usaha pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi lingkungan pertanian, ketersediaan teknologi, struktur dan kinerja pasar, dan seperangkat kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pertanian. Demikian juga Rusastra *et al.* (2004) mengidentifikasi bahwa pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan diperlukan kondisi sebagai berikut: (a) aksesibilitas terhadap benih tanaman hortikultur dan palawija; (b) penyediaan kredit khusus untuk membiayai biaya yang lebih tinggi pada program diversifikasi; (c) penggunaan teknologi yang menghemat tenaga kerja untuk persiapan lahan, penanaman dan penyiangan; (d) manajemen penyediaan air irigasi yang terkoordinasi untuk tanaman palawija atau tanaman hortikultura, dan (e) penyuluhan pertanian yang berkaitan dengan teknologi baru untuk padi maupun untuk komoditas nonpadi.

Dengan adanya perubahan-perubahan ekologis maupun ekonomi selama dekade terakhir, termasuk luas penguasaan lahan pertanian oleh petani, perubahan

iklim, serta ekonomi global, pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan di Indonesia masih memerlukan banyak kajian yang lebih baru. Makin sempitnya lahan yang dikuasai petani, baik di Jawa maupun di Luar Jawa, yang semakin tidak efisien untuk diusahakan dewasa ini, telah memunculkan wacana untuk melakukan konsolidasi lahan agar usahatani yang dilakukan mencapai tingkat efisiensi. Perkembangan-perkembangan konsep seperti ini akan berkaitan dengan model diversifikasi usahatani tanaman yang sesuai untuk dikembangkan di Indonesia.

Selain itu, setiap agroekosistem memiliki karakteristik lingkungan yang khas, khususnya untuk jenis komoditas yang diusahakan dan model diversifikasi usahatani tanaman pangan yang dilakukannya. Kondisi seperti ini akan membedakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan petani dalam melakukan diversifikasi tersebut. Ketersediaan informasi mengenai keadaan di atas berdasarkan agroekosistem yang berbeda akan merupakan bahan bermanfaat bagi pembuat kebijakan untuk menentukan program spesifik apa yang perlu dilakukan dalam rangka mengembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan di masing-masing agroekosistem.

Faktor yang tidak kalah penting dari pengembangan diversifikasi usahatani tanaman adalah dukungan kebijakan pemerintah yang lebih fokus. Kebijakan diperlukan untuk memberi ruang yang lebih besar, serta memfasilitasi agar petani sebagai pelaku tertarik untuk mengembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan. Kebijakan yang ada saat ini dinilai masih adanya bias untuk mempertahankan pengembangan padi, dalam rangka mempertahankan swasembada.

Tujuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut: a) membahas urgensi dan dilema kebijakan diversifikasi usahatani tanaman; b) menganalisis profil dan pola perubahan diversifikasi usahatani tanaman pada berbagai agroekosistem; c) merumuskan kebijakan strategis dalam mengakselerasi diversifikasi usahatani tanaman pangan di lahan sawah dan lahan kering.

URGENSI DIVERSIFIKASI USAHATANI TANAMAN PANGAN

Setiap wilayah dengan potensi agroekosistem dan jenis konsumsi pangan yang berbeda, telah memungkinkan terjadinya diversifikasi usahatani tanaman pangan. Dengan orientasi produksi pangan yang didasarkan pada konsep subsistensi, setiap wilayah cenderung mengusahakan jenis tanaman yang berbeda. Berkembangnya orientasi subsistensi menjadi lebih komersial, dan makin kuatnya dorongan perdagangan antar wilayah, telah menyebabkan penyesuaian-penyesuaian tanaman yang diusahakan di masing-masing wilayah. Demikian juga, kemajuan teknologi telah mampu meningkatkan produksi tanaman pada wilayah yang secara agroekosistem sesuai maupun pada daerah yang sebelumnya dinilai

tidak layak. Oleh karena itu, dalam memenuhi konsumsi masyarakat, penawaran bahan pangan muncul dari berbagai wilayah. Hal ini mengakibatkan terjadinya eksekusi produksi untuk komoditas-komoditas tertentu, yang pada gilirannya menyebabkan harga produk tersebut jatuh.

Sulitnya memprediksi volume produksi pertanian apa saja yang akan dihasilkan, menyebabkan pilihan memproduksi satu jenis tanaman akan lebih berisiko bagi petani, dibandingkan dengan memproduksi lebih dari satu jenis tanaman. Dengan adanya kebijakan harga dasar gabah, usahatani padi dinilai sebagai usahatani yang memiliki risiko paling kecil, karena harga gabah cenderung lebih stabil dibanding dengan produk pertanian lainnya. Kendati demikian, dengan makin berkembangnya permintaan komoditas nonpadi, memungkinkan terjadi eksekusi permintaan untuk produk pertanian nonpadi, yang menyebabkan harga untuk komoditas tersebut dapat melambung tinggi. Sebaliknya, walaupun harga gabah dikawal oleh pemerintah, pada kenyataannya harga gabah sering mengalami penurunan drastis pada saat panen.

Selain itu, dengan semakin terbukanya perdagangan internasional, terjadinya tingkat harga suatu komoditas tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi di dalam negeri, melainkan juga ditentukan oleh besarnya volume komoditas tersebut di pasar dunia. Dengan kondisi seperti ini, terdapat alasan kuat bahwa melakukan diversifikasi usahatani tanaman merupakan pola paling menguntungkan dalam kegiatan usahatani. Diversifikasi usahatani tanaman juga diperlukan dalam rangka mendukung terjadinya perubahan pola makan, akibat adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Diversifikasi usahatani tanaman juga terdorong dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang cepat, urbanisasi, dan globalisasi, telah menyebabkan terjadinya diversifikasi dalam pola makan, yaitu dari konsumsi pangan pokok dalam proporsi yang besar menjadi konsumsi pangan yang lebih bervariasi (Pingali, 2004).

Dalam usahatani skala kecil, diversifikasi usahatani tanaman pangan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu tumpang sari, diversifikasi pada lahan yang berbeda pada musim yang sama, serta pergiliran tanaman antar musim. Jenis tanaman yang diusahakan dapat berbeda dalam setiap musim, tergantung pada prediksi petani mengenai harga yang akan terjadi. Sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan yang dipromosikan pemerintah, tanaman yang diusahakan sebaiknya diarahkan kepada tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga dapat diharapkan akan meningkatkan pendapatan petani.

DILEMA KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI USAHATANI TANAMAN PANGAN

Walaupun diversifikasi usahatani tanaman pangan memiliki manfaat yang besar, dan pemerintah telah melaksanakan program tersebut sejak Pelita I, akan

tetapi program tersebut tidak berkelanjutan serta tidak diikuti dengan petunjuk yang jelas. Sebagai gantinya, pemerintah memprioritaskan produksi padi untuk mencapai swasembada (Siregar dan Suryadi, 2006). Tarik menarik antara mengedepankan kepentingan petani melalui diversifikasi usahatani tanaman pangan dan mementingkan kepentingan nasional dengan mengamankan produksi beras, merupakan isu yang tidak berujung. Diversifikasi usahatani tanaman pangan sering dilihat sebagai ancaman terhadap program intensifikasi yang dirancang untuk mencapai target produksi yang ambisius (Barghouti *et al.*, 1992).

Sejak tercapainya swasembada beras pada tahun 1984, penancangan pembangunan pertanian dalam Repelita V (1989-1994) secara implisit lebih banyak memfokuskan pada upaya mempertahankan swasembada beras. Secara rasional hal ini dapat dimengerti, karena upaya mencapai swasembada beras dilakukan melalui waktu yang cukup panjang, sehingga mempertahankan swasembada tersebut merupakan sesuatu yang penting. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dipandang sebagai jalan yang kontradiktif dengan upaya mempertahankan swasembada beras. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya persaingan penggunaan lahan, sehingga apabila tanaman nonpadi dikembangkan khususnya pada sentra produksi padi maka praktis areal tanam untuk padi akan berkurang. Mengembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan sama artinya dengan mengurangi produksi padi.

Permasalahannya, walaupun padi merupakan satu-satunya komoditas yang paling mendapat perhatian, khususnya dalam penetapan harga dasar, pada kenyataannya petani padi sawah sendiri belum memperoleh pendapatan yang layak. Hal ini disebabkan karena harga yang terjadi di tingkat petani hampir selalu tertekan di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, memprioritaskan produksi padi sama artinya dengan menjauhkan petani dari kesejahteraan.

Terjadinya harga beras di tingkat petani yang cenderung di bawah harga dasar, khususnya pada tanam musim hujan, ditambah dengan harga input yang cenderung lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah, membuat upaya peningkatan pendapatan petani padi mengarah pada komoditas di luar beras (diversifikasi). Upaya mempertahankan swasembada beras dan peningkatan pendapatan petani beras yang bersifat kontradiktif ini dirasakan sebagai dilema yang masih sulit dipecahkan. Adanya kekhawatiran menurunnya produksi beras dapat dilihat di lapangan, seolah-olah ada konvensi tidak tertulis di mana lahan sawah hanya boleh ditanami padi, sehingga petani yang diketahui mengusahakan tanaman selain padi harus segera menggantinya dengan tanaman padi.

Konflik kepentingan antara mempertahankan swasembada beras dan upaya meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi usahatani tanaman pangan memicu dibuatnya Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian. Inti dari undang-undang tersebut adalah memberi kebebasan kepada petani untuk mengusahakan tanaman apa saja, sehingga dapat memberi

kesempatan kepada petani untuk melakukan diversifikasi usahatani tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan dari usahatani. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan, walaupun tidak disertai dengan program pengembangan yang jelas. Dengan keluarnya UU No.12 tahun 1992 akan banyak mempengaruhi upaya mempertahankan swasembada beras. Dapat dikatakan bahwa dengan berakhirnya Pelita V tahun 1994 berakhir pula swasembada beras.

Dari sisi pelaksanaan di lapangan, Pingali (2004) mengidentifikasi empat faktor yang menjadi kendala pengembangan diversifikasi tanaman pangan, yaitu: sifat petani yang cenderung menghindari dari risiko (*risk aversion*), masalah kesesuaian dan hak atas lahan, infrastruktur irigasi, dan ketersediaan tenaga kerja. *Risk aversion* merupakan kendala utama dalam pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan di lahan sawah. Petani lebih memilih untuk berkonsentrasi pada tanaman yang sudah dikenalnya dengan baik dari sisi teknologi dan hasil, serta harga yang stabil. Timmer (1992) menyebutkan bahwa, untuk kasus Indonesia, risiko harga dalam menanam padi lebih kecil dibanding komoditas lainnya. Risiko harga yang terjadi pada komoditas nonpadi disebabkan ketidakpastian harga, ketidakteraturan produksi dan sedikitnya campur tangan pemerintah dalam mengendalikan harga (Pingali, 2004).

Tidak semua jenis lahan cocok untuk mengembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan. Lahan sawah tidak mudah untuk dikonversi untuk tanaman nonpadi, karena terkait dengan drainase, demikian juga lahan kering (*upland*) yang memerlukan investasi pengendalian erosi. Hak penyewa atas lahan ikut mempengaruhi petani dalam melakukan diversifikasi usahatani tanaman pangan, khususnya dalam hal investasi terhadap lahan untuk jangka panjang.

Pingali (2004) berpendapat bahwa keberadaan sistem irigasi yang ada menghambat terjadinya diversifikasi usahatani tanaman pangan, yang disebabkan karena infrastruktur yang kaku dan sistem penyaluran air yang tidak fleksibel. Keadaan ini menyulitkan alokasi air yang baik untuk usahatani nonpadi, dan seakan-akan memaksa petani untuk hanya melakukan monokultur padi. Dengan gambaran seperti ini, diperlukan adanya investasi teknologi pada lahan bersistem irigasi untuk mempromosikan diversifikasi usahatani tanaman pangan, terutama investasi modal dalam sistem penyaluran, pembagian, dan drainase.

Tenaga kerja merupakan salah satu kendala pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan. Sistem penanaman yang lebih berdiversifikasi umumnya memerlukan tenaga kerja yang lebih besar. Sebagai gambaran, dibandingkan dengan padi, usahatani bawang, sayuran dan tanaman bernilai tinggi lainnya memerlukan tenaga kerja yang lebih besar. Penggunaan tenaga kerja untuk pembuatan drainase sementara adalah bagian dari kegiatan penting untuk melakukan penanaman palawija pada lahan bekas tanaman padi. Demikian juga, kegiatan penyiangan, panen, dan pasca panen memerlukan tenaga kerja lebih

banyak untuk jenis-jenis tanaman di atas. Tingginya penggunaan tenaga kerja untuk kegiatan tersebut membuat petani mengurangi luas areal tanam pada saat mengusahakan tanaman nonpadi.

KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI USAHATANI TANAMAN PANGAN

Dukungan kebijakan dan komitmen penerapannya merupakan faktor yang sangat menentukan pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan di Indonesia. Dalam Arah dan Kebijakan Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang 2005-2025 Departemen Pertanian, disebutkan bahwa program diversifikasi merupakan salah satu dari upaya untuk mewujudkan sistem usahatani bernilai tinggi di samping melalui intensifikasi dan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan. Nilai tinggi yang dapat diperoleh dari program diversifikasi pada hakekatnya merupakan hasil optimal, sebagai hasil dari upaya menghindari dari risiko rendahnya harga pada komoditas yang diusahakan. Intensifikasi juga memungkinkan untuk memperoleh nilai tinggi, karena berkaitan dengan kegiatan meningkatkan produksi pada lahan yang sama. Demikian juga, pengembangan perwilayahan komoditas, karena didasarkan pada keunggulan komparatif, pengembangan komoditas pada lahan-lahan yang sesuai dengan agroekosistemnya, memungkinkan untuk mendapat hasil tinggi.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan dapat ditelusuri dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2005-2009 Departemen Pertanian. Dalam jangka menengah Departemen Pertanian menetapkan tiga program utama pembangunan pertanian, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Tujuan program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) adalah agar masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Kegiatan operasional program PKP tahun 2007 mencakup kegiatan pokok: (1) peningkatan produksi dan produktivitas, (2) peningkatan distribusi dan akses pangan, (3) konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan, dan (4) kegiatan pendukung.

Program Pengembangan Agribisnis (PA) diarahkan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian yang produktif dan efisien untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto). Sementara itu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PKP) bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani.

Tampak bahwa konsep diversifikasi yang dinyatakan dalam program-program tersebut cenderung mengarah pada diversifikasi dalam konteks umum, di mana menghasilkan produksi dengan banyak jenis adalah lebih baik dibanding dengan jenis yang terbatas. Tidak dijumpai konsep diversifikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, melalui kegiatan yang mereka lakukan. Program perwilayahan komoditas cenderung menekankan pada program diversifikasi regional, yang lebih menekankan pada konteks penyediaan bahan pangan yang beragam. Sementara itu, diversifikasi usahatani tanaman pangan lebih menekankan pada upaya menjaga agar pendapatan petani dapat dipertahankan tidak turun, bahkan diharapkan meningkat. Dalam konteks ini, penyediaan bahan pangan yang beragam merupakan dampak positif dari pengembangan diversifikasi.

Diversifikasi juga muncul dalam kebijakan dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pertanian bersamaan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Revitalisasi Pertanian merupakan kebijakan dalam menindaklanjuti Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah. Kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas pembangunan nasional (2005-2009) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia pada awal tahun 2005 yang lalu, yaitu “Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)”. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi: (1) peningkatan investasi dan ekspor non-migas; (2) pemantapan stabilisasi ekonomi makro; (3) penanggulangan kemiskinan; (4) pembangunan perdesaan; dan (5) perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Khusus untuk Revitalisasi Pertanian, kandungan yang berkaitan dengan upaya diversifikasi, yaitu berupa diversifikasi usahatani tidak dinyatakan secara jelas.

Pengembangan diversifikasi usahatani tanaman tidak dinyatakan secara khusus berupa model dan prosesnya, akan tetapi dinyatakan dalam bentuk pengembangan banyak komoditas. Kebijakan pengembangan sentra/kawasan komoditas unggulan ke depan akan difokuskan pada pengembangan 32 jenis komoditas unggulan nasional yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komoditas unggulan tersebut mencakup : (1) tanaman pangan : padi, jagung, kedele, ubi kayu, dan kacang tanah; (2) hortikultura : kentang, cabai merah, bawang merah, mangga, manggis, pisang, angrek, durian, jeruk, dan rimpang (sebagian besar merupakan tanaman obat-obatan/biofarmaka); (3) perkebunan : kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman serat, tebu, tembakau, dan cengkeh; dan (4) peternakan : sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik. Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pengembangan komoditas, saat ini Departemen Pertanian telah menyusun *road map* prospek dan arah pengembangan agribisnis bagi 17 dari 32 komoditas unggulan tersebut.

Sejak otonomi menjadi isu nasional, kebijakan pengembangan komoditas Departemen Pertanian sebenarnya sudah diarahkan pada pengembangan daerah berupa pengembangan komoditas spesifik lokasi. Program tersebut merupakan langkah yang lebih maju dari pengembangan komoditas yang sentralistik

sebelumnya, di mana perencanaan pengembangan dilakukan berdasarkan prioritas secara nasional. Dalam rumusan musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrenbangtan) nasional yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 April 2006, rencana pengembangan komoditas sudah dilakukan berdasar usulan-usulan dari daerah, atau tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pusat. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan komoditas yang dipandang sesuai bagi daerahnya masing-masing. Usulan-usulan pengembangan komoditas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk kesesuaian agroklimat, peluang pasar, maupun sumberdaya manusia yang tersedia.

PROFIL DAN POLA PERUBAHAN DIVERSIFIKASI USAHATANI TANAMAN

Sejak diversifikasi usahatani tanaman pangan dimasukkan kedalam program pembangunan pertanian pada Pelita I, telah cukup banyak kajian penelitian usahatani diversifikasi usahatani tanaman pangan dilakukan. Dari hasil-hasil penelitian juga telah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi berbagai jenis diversifikasi usahatani tanaman pangan, yang dinilai lebih menguntungkan dari usahatani monokultur. Akan tetapi pada kenyataannya diversifikasi usahatani tanaman pangan tidak berkembang seperti yang diharapkan, dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan diversifikasi usahatani tanaman khususnya pangan. Hal ini antara lain disebabkan karena prakondisi yang belum mantap bagi implementasi pola tanam rekomendasi di lapangan, dan relatif lemahnya dukungan kebijakan dan fasilitas pemerintah dalam mendukung pengembangan diversifikasi pertanian (Rusastra *et al.*, 2004).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Suryadi (2007) menunjukkan bahwa selama periode 1996-2002, kondisi pengembangan komoditas lebih mengarah pada spesialisasi daripada diversifikasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 19 provinsi dari 23 provinsi yang diteliti mengalami penurunan indeks diversifikasi (menuju spesialisasi). Bersamaan dengan menurunnya indeks diversifikasi, provinsi yang melakukan spesialisasi usahatani padi meningkat 14 menjadi 16 provinsi, selama periode tersebut. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa diversifikasi kurang kondusif untuk dilakukan, dan usahatani padi dipandang semakin menarik untuk diusahakan.

Penelitian Haeruman (2008) di Sembilan provinsi di Jawa dan luar Jawa, menunjukkan bahwa perkembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan, memiliki perkembangan yang berbeda antar agroekosistem dan antarpulau. Di Jawa, diversifikasi usahatani tanaman pangan lebih banyak dilakukan pada lahan kering, sedangkan di luar Jawa, cenderung dilakukan pada lahan sawah. Perbedaan perkembangan tersebut berkaitan erat dengan potensi lahan dan pemasaran hasil pertanian. Di Jawa, di mana jaringan irigasi relatif lebih baik,

memungkinkan petani untuk menanam padi lebih dari satu kali per tahun. Selama air dipandang cukup untuk menanam padi, petani lebih cenderung menanam sawahnya dengan padi (Saptana *et al.*, 2003). Palawija ditanam pada musim kering, di mana air sudah tidak mencukupi untuk melakukan usahatani padi.

Agroekosistem Lahan Sawah

Petani pada agroekosistem lahan sawah cenderung mengusahakan padi secara monokultur, tanpa menanam lahannya dengan komoditas lainnya. Menurut pandangan petani pada agroekosistem lahan sawah, usahatani padi memiliki banyak keunggulan, antara lain dapat dilakukan dengan relatif mudah, harga hasil yang relatif stabil, dan berfungsi menyediakan pangan pokok keluarga. Selain itu, lahan sawah memang didesain untuk ditanami padi, sehingga memerlukan pekerjaan yang cukup banyak untuk mengusahakan tanaman lain.

Petani pada agroekosistem lahan sawah cenderung enggan melakukan diversifikasi usahatani tanaman pangan karena mereka juga tidak terbiasa dengan usahatani nonpadi. Demikian juga, sumberdaya yang ada telah secara khusus dialokasikan untuk melakukan usahatani padi. Penggunaan sumberdaya tersebut untuk mengusahakan tanaman lainnya dipandang akan mengganggu kegiatan usahatani padinya, terutama apabila usahatani nonpadi mengalami kegagalan. Rendahnya ketrampilan melakukan usahatani nonpadi merupakan salah satu faktor yang dapat menggagalkan usahatani tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pada saat air irigasi berisiko terjadi kekurangan sekalipun, maka pilihan mereka adalah menanam padi. Walaupun pilihan tersebut dianggap tidak logis, namun menunjukkan bahwa secara implisit petani masih menganggap bahwa menanam lahannya dengan padi, memiliki risiko yang lebih kecil dibanding menanamnya dengan palawija. Namun demikian, dengan adanya pengalaman kegagalan yang berulang yang terjadi pada tanaman padinya, petani mulai menghindari risiko tersebut dengan menanam lahannya dengan palawija. Pada musim tanam ketiga (Mei/Juni-September/Oktober), sebagian besar petani di agroekosistem lahan sawah irigasi teknis umumnya memilih memberakan lahannya daripada menanamnya dengan palawija atau sayuran. Memasuki musim tanam ketiga, pintu air irigasi biasanya ditutup untuk tujuan penghematan, dan memberi kesempatan kepada petugas pengairan untuk melakukan perbaikan saluran. Meskipun demikian, air irigasi dapat terus dialirkan apabila ada usulan dari banyak petani.

Diversifikasi usahatani tanaman pangan pada agroekosistem lahan sawah dilakukan baik melalui pergiliran tanaman maupun tumpang sari. Pergiliran tanaman dilakukan terutama pada saat air irigasi kurang mencukupi. Diversifikasi usahatani tanaman pangan seperti ini biasanya dilakukan pada lahan sawah tadah hujan, di mana pada musim tanam kedua (Februari/Maret-April/Mei) curah hujan diperkirakan hanya sedikit dan tidak kondusif untuk ditanami padi. Demikian

juga, dengan kondisi pada saat iklim mengalami perubahan, sawah irigasi belum tentu mendapat air yang cukup pada musim tanam kedua. Dengan keadaan seperti ini, petani lebih memilih menanam palawija dibanding padi yang dianggap lebih berisiko. Akan tetapi penanamannya pun hanya dilakukan pada lahan yang lebih kecil.

Dilihat dari perkembangannya selama periode 1995-2008, diversifikasi usahatani tanaman pangan pada agroekosistem lahan sawah di sembilan provinsi (Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan (Tabel 1). Perubahan yang terjadi hanya pada jenis komoditas yang diusahakan. Tampak bahwa komoditas seperti jagung, cabe, kacang panjang, dan tebu dewasa ini lebih banyak dipilih. Keempat jenis komoditas ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Walaupun jagung umumnya merupakan tanaman palawija yang memiliki nilai relatif rendah, akan tetapi apabila ditujukan untuk dikonsumsi sebagai sayuran, maka nilainya cukup tinggi, misalnya berupa jagung manis yang dipanen muda, serta *baby corn*.

Tabel 1. Persentase Jenis Komoditas yang Diusahakan pada Agroekosistem Lahan Sawah, di Sembilan Provinsi, Indonesia, 1995-2008¹⁾

Komoditas	Lahan Sawah (%)	
	Tahun 1995	Tahun 2008
Padi	90,9	89,3
Jagung	1,1	2,1
Ubi Kayu	1,1	0,5
Kac. Tanah	0,6	-
Subtotal padi & palawija	93,8	92,0
Bawang merah	1,1	1,1
Terung	0,6	0,5
Cabe	-	0,5
Kacang Panjang	-	0,5
Subtotal tan.sayuran	1,7	2,7
Tebu	0,6	2,1
Tembakau	1,1	1,1
Cengkeh	0,6	-
Kelapa	2,3	2,1
Subtotal tan.tahunan	4,5	5,3
Total	100,0	100,0

Sumber: Haeruman *et al.*, 2008

¹⁾ Keterangan: Di setiap propinsi diambil 4 desa contoh sehingga secara keseluruhan ada 36 desa contoh lokasi penelitian

Agroekosistem Lahan Kering

Dalam upaya mengurangi risiko, diversifikasi usahatani tanaman pangan pada lahan kering di Pulau Jawa merupakan kegiatan yang sudah dilakukan petani sejak lama, baik berupa tumpang sari maupun pergiliran tanaman antar musim. Pada lahan yang relatif sempit petani menanam berbagai macam sayuran. Walaupun diversifikasi usahatani tanaman pangan banyak yang dilakukan pada skala kecil, kegiatan tersebut tetap memberikan keuntungan signifikan, karena komoditas yang diusahakan memiliki nilai tinggi. Salah satu faktor yang memungkinkan diversifikasi usahatani tanaman pangan skala kecil tetap menguntungkan adalah pemasaran hasilnya dapat melalui rantai yang pendek. Komoditas yang dihasilkan dapat dipasarkan langsung ke konsumen di pasar, atau melalui pedagang pengumpul. Pemasaran langsung ke konsumen dimungkinkan, karena jumlah penduduk yang besar dan daya beli relatif tinggi.

Dibanding di Jawa, tingkat diversifikasi usahatani tanaman pangan yang dilakukan petani lahan kering di luar Jawa jauh lebih rendah. Bahkan lebih rendah dibanding dengan tingkat diversifikasi usahatani tanaman pangan yang dilakukan oleh petani di agroekosistem lahan sawah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Keadaan seperti ini terutama disebabkan karena faktor pemasaran yang lebih sulit, selain kurangnya tenaga kerja selama proses produksi. Pengusahaan lahan kering lebih diarahkan pada komoditas yang tidak mudah busuk, disesuaikan dengan potensi pasar yang ada. Untuk memasarkan hasil pertanian biasanya harus menempuh perjalanan yang relatif jauh, sehingga berisiko terhadap kerusakan selama dalam perjalanan. Petani di Propinsi Lampung banyak yang memilih usahatani ubi kayu, menyesuaikan dengan permintaan terhadap komoditas tersebut. Dengan dibangunnya industri-industri pengolahan ubi kayu, baik untuk tujuan pangan maupun non pangan, permintaan terhadap ubi kayu menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, harga ubikayu merupakan yang paling stabil setelah harga padi, sehingga diversifikasi usahatani tanaman pangan ke arah tanaman lain yang bernilai tinggi sulit untuk dilakukan.

Sulitnya mencari alternatif pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan di daerah ini, pemerintah daerah mengarahkan diversifikasi usahatani ubi kayu dengan usaha ternak kecil, yang dipandang lebih prospektif. Integrasi ternak kecil ke dalam usahatani ubikayu memiliki dua tujuan. Pertama ditujukan untuk menambah pendapatan petani, dan kedua untuk memanfaatkan limbah dari usahatani tanaman dan usaha ternak. Limbah pertanian, berupa daun-daunan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak kecil, sedangkan limbah usaha ternak dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah, sehingga dapat meningkatkan hasil tanaman. Pada usahatani ubikayu, manfaat terintegrasinya ternak kecil sangat dirasakan oleh petani.

Pada usahatani ubikayu di mana penanaman dan panen dilakukan dengan frekuensi tinggi (dalam satu desa hampir tiap hari ada petani yang tanam maupun panen), limbah berupa daun ubikayu sangat berlimpah. Oleh karena itu integrasi ternak kambing ke dalam usahatani ubikayu dipandang sangat tepat. Di lain

pihak, tanaman ubikayu yang rakus hara, memerlukan input pupuk organik dalam jumlah besar untuk mempertahankan struktur dan kesuburan tanah. Sementara itu, di lahan kering Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, umumnya petani mengusahakan tanaman kacang-kacangan dan sayuran, tetapi masih untuk areal yang terbatas. Petani yang memiliki lahan cukup luas cenderung mengembangkannya kearah tanaman perkebunan, terutama jeruk.

Dilihat dari perubahannya, di semua lokasi penelitian di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1995-2008, tidak dijumpai perubahan pola usahatani yang signifikan, baik menuju diversifikasi maupun spesialisasi (Tabel 2). Namun demikian di beberapa desa dijumpai bahwa persentase petani yang menanam padi berkurang jumlahnya. Hal ini antara lain disebabkan karena bertanam padi di lahan kering semakin tidak menguntungkan, mengingat iklim yang tidak sulit diprediksi dewasa ini. Tanaman padi ladang cenderung diganti menjadi tanaman ubi kayu, yang dirasakan lebih menguntungkan. Produktivitas ubi kayu juga cenderung meningkat dengan adanya penggunaan kotoran kambing sebagai pupuk ubi kayu.

Tabel 2. Persentase Jenis Komoditas Pangan yang Diusahakan pada Agroekosistem Lahan Kering di Sembilan Provinsi, Indonesia 1995-2008¹⁾

Komoditas	Lahan Kering Pangan (%)	
	1995	2008
Padi	18,9	15,4
Jagung	23,0	23,1
Ubi Kayu	10,8	14,1
Subtotal padi & palawija	52,7	52,6
Bawang merah	3,7	2,3
Bawang daun	2,4	4,8
Kubis	4,8	1,9
Petsai	2,7	1,3
Sawi	1,4	2,6
Wortel	18,9	17,9
Buncis	1,4	2,6
Kentang	-	2,6
Subtotal tan.sayuran	35,1	35,9
Cengkeh	1,4	1,3
Kopi	4,1	3,8
Aren	1,4	1,3
Salak	1,4	1,3
Jambu mete	4,1	1,3
Subtotal tan.tahunan	12,2	11,5
Total	100,0	100,0

Sumber: Haeruman *et.al.*, 2008

¹⁾ Keterangan: Di setiap propinsi diambil 4 desa contoh sehingga secara keseluruhan ada 36 desa contoh lokasi penelitian

Tabel 2 menunjukkan bahwa, secara umum pengusahaan tanaman sayuran meningkat sangat kecil, dari 35,1 persen menjadi 35,9 persen. Walaupun demikian apabila dilihat untuk masing-masing komoditas, tampak bahwa pengusahaan sebagian komoditas tertentu mengalami peningkatan cukup signifikan. Pengusahaan bawang daun, buncis, dan kentang mengalami peningkatan, sedangkan bawang merah, kubis, petsai dan wortel mengalami penurunan. Kendati demikian fluktuasi semacam ini merupakan hal yang biasa terjadi pada tanaman sayuran, menyesuaikan dengan keadaan harga untuk jangka pendek.

Sementara itu, pengusahaan tanaman perkebunan pada agroekosistem lahan kering tanaman pangan mengalami kecenderungan berkurang, dan terjadi pada banyak komoditas. Jambu mete merupakan komoditas yang berkurang cukup signifikan. Walaupun dalam luasan yang masih sangat kecil dan tidak tercantum dalam tabel, gejala perubahan menuju agroekosistem lahan perkebunan kelapa sawit sudah mulai dirasakan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, serta prospek keuntungan yang lebih baik dan berkelanjutan dari perkebunan tersebut, telah mendorong masyarakat untuk ikut melakukan investasi di bidang yang sama. Di Lampung misalnya dijumpai petani karet bahkan petani tanaman pangan mengkonversi lahan mereka menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perubahan ke arah agroekosistem lahan perkebunan sawit dipandang sangat kondusif, karena adanya faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) yang cukup kuat. Yang termasuk faktor pendorong adalah adanya fakta bahwa melakukan usahatani tanaman pangan makin dipandang sulit bagi petani, terutama berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang dapat diperoleh dari usahatani tersebut. Hal ini disebabkan karena makin tingginya harga dan kelangkaan sarana produksi, dan tidak menentunya harga produk pertanian yang dihasilkan. Keadaan seperti ini mendorong petani untuk meninggalkan usahatani yang selama ini ditekuni, dan mencari usaha lain yang lebih menguntungkan. Di lain pihak, permintaan CPO yang terus meningkat telah meningkatkan harga produk tersebut semakin tinggi. Keadaan seperti ini mampu menarik petani untuk mengkonversi lahan tanaman pangan mereka menjadi kebun sawit. Petani menganggap bahwa walaupun harga pupuk masih dirasakan mahal, namun karena harga tandan kelapa sawit cukup tinggi, maka usaha kebun sawit terasa lebih menguntungkan.

KEBIJAKAN STRATEGIS KE DEPAN

Pada pelaksanaan pembangunan pertanian kedepan, pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan tetap relevan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan petani dan optimalisasi penggunaan lahan baik pada lahan sawah (di Jawa dan luar Jawa) maupun lahan kering (terutama di luar Jawa). Pada agroekosistem lahan sawah terdapat tiga jenis diversifikasi usahatani

tanaman pangan, yaitu tumpang sari, diversifikasi antar persil, dan diversifikasi antar musim. Kendati demikian, jenis diversifikasi usahatani tanaman yang tidak mengganggu program swasembada beras adalah diversifikasi antar musim. Pada lahan sawah, jenis diversifikasi ini sebenarnya merupakan pemanfaatan lahan untuk usahatani nonpadi, pada saat padi tidak memungkinkan untuk ditanam, karena ketersediaan air irigasi atau air hujan tidak mencukupi.

Diversifikasi usahatani tanaman pangan pada lahan sawah memerlukan dukungan pemerintah, terutama dalam proses produksi dan pemasaran hasilnya. Untuk memudahkan dalam pemberian dukungan, diversifikasi usahatani tanaman pangan diarahkan pada komoditas yang selama ini masih diimpor dan memiliki permintaan tinggi, yaitu kedelai dan jagung. Mengaitkan pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan dengan upaya swasembada kedelai dan jagung dipandang efisien. Selain itu, kedelai dan jagung merupakan komoditas yang sudah biasa ditanam di lahan sawah, tanpa memerlukan biaya pengolahan lahan yang besar. Sawah juga umumnya masih mengandung residu pupuk bekas pemupukan untuk tanaman padi, sehingga dapat mengurangi biaya pemupukan.

Diperlukan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif dalam pengembangan diversifikasi (penanaman kedelai dan jagung), seperti penyediaan benih bermutu, varietas genjah, serta sarana pengolahan. Sarana-sarana tersebut diperlukan untuk meningkatkan produksi, menghemat waktu dan mempermudah dalam penanganan pasca panen. Selama ini kurangnya ketersediaan sarana-sarana tersebut kurang mampu meningkatkan minat petani untuk melakukan pengusahaan komoditas tersebut. Sarana lainnya yang sangat penting adalah adanya jaminan pemasaran hasil. Hal ini secara teoritis sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat permintaan terhadap komoditas tersebut tinggi.

Apabila dukungan terhadap pengembangan komoditas kedelai dan jagung dapat berjalan baik, maka memungkinkan petani memiliki kepastian memperoleh pendapatan tambahan, selain dari usahatani padi yang biasa mereka peroleh. Untuk memastikan bahwa petani dapat memperoleh pendapatan tambahan dari kegiatan usahatani kedelai dan jagung, pemerintah dapat memberi semacam 'subsidi' dalam bentuk benih, pupuk, dan ongkos yang lebih murah.

Sementara itu, pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan di agroekosistem lahan kering, khususnya di luar Jawa, perlu didukung oleh penyediaan varietas unggul yang lebih adaptif untuk dikembangkan pada lahan kering. Padi merupakan salah satu komoditas yang prospektif untuk dikembangkan di lahan kering. Gerakan yang lebih gencar untuk mengembangkan padi di lahan kering, dapat membidik dua sasaran sekaligus, yaitu mengakselerasi diversifikasi usahatani tanaman pangan di lahan kering dan menjadikan lahan kering sebagai penopang swasembada beras yang dapat diandalkan. Diperlukan dukungan penuh pemerintah untuk pengembangan diversifikasi di lahan kering, mulai penyediaan varietas unggul yang lebih adaptif sampai dengan tahap pemasaran.

Untuk mengakselerasi diversifikasi usahatani tanaman pangan di lahan sawah maupun lahan kering, selain memberikan dukungan langsung, pemerintah juga dapat memberi dukungan dengan melibatkan pihak swasta. Pada beberapa daerah di Jawa, kerjasama petani dengan pihak swasta telah dilakukan dan telah memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Kerjasama antara petani dan swasta yang telah dilakukan misalnya di lahan kering di daerah Bandung yaitu memasok sayuran ke super market atau untuk tujuan ekspor, sedangkan di lahan sawah di daerah Cianjur yaitu pemasaran beras organik dan beras pandan wangi ke super market.

Pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan juga dapat dilakukan dengan dana dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*), program yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang cukup relevan mengarahkan dana CSR-nya untuk pengembangan diversifikasi adalah perusahaan perkebunan sawit, yang memiliki lahan sangat luas dan berpotensi membuat daerah sekitar kebun sawit menjadi lebih kering, karena sawit merupakan tanaman yang memerlukan air sangat banyak.

PENUTUP

Kajian terhadap diversifikasi usahatani telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi usahatani memiliki peranan yang sangat penting dilihat dari berbagai aspek. Karena alasan manfaatnya yang besar, diversifikasi usahatani direkomendasikan sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun demikian, diversifikasi usahatani tanaman pangan belum memperoleh dukungan penuh dari pemerintah, yang disebabkan karena pengembangan diversifikasi dipandang mengancam upaya swasembada beras. Semakin besar tingkat diversifikasi, maka semakin kecil proporsi lahan untuk memproduksi padi.

Diversifikasi usahatani tanaman pangan secara signifikan hanya terjadi pada agroekosistem lahan kering tanaman pangan di Jawa. Perkembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan pada agroekosistem lahan kering lebih cenderung dilakukan secara naluriah, untuk menghadapi gejolak harga komoditas, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara itu di lahan sawah, baik di Jawa maupun luar Jawa, diversifikasi usahatani tanaman pangan cenderung tidak berkembang. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksiapan petani dalam melakukannya.

Pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan memerlukan strategi yang tepat, agar memberikan manfaat khususnya tambahan pendapatan bagi petani, tetapi tidak bertentangan dengan upaya swasembada beras. Pada lahan sawah di Jawa maupun di luar Jawa perlu dikembangkan diversifikasi usahatani tanaman pangan antar musim, yang memanfaatkan masa tidak menanam padi.

Komoditas yang dianggap sesuai untuk diusahakan adalah kedelai dan jagung, yang diintegrasikan dengan upaya mencapai swasembada kedua komoditas tersebut. Sementara itu pada lahan kering, padi merupakan komoditas yang dianggap tepat untuk mengakselerasi diversifikasi usahatani tanaman pangan, karena sekaligus berfungsi mendukung swasembada beras.

Untuk mengembangkan program diversifikasi usahatani tanaman pangan di lahan sawah maupun lahan kering, diperlukan dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari tahap penyediaan varietas unggul, sampai dengan pemasaran. Pemerintah juga dapat melibatkan pihak swasta untuk bekerjasama dengan petani, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Selain sumberdana negara, pengembangan diversifikasi usahatani tanaman pangan juga dapat menggunakan dana CSR, khususnya dari perusahaan perkebunan sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Barghouti, S.M., L. Garbus, dan D. Umali (Editors). 1992. *Trends in Agricultural Diversification Regional Perspective*. World Bank Technical Paper Number 180: The World Bank, Washington, D.C.
- Haeruman, M., R.S.N. Widjaya, Y. Yusdja, T. Karyani, I. Ayesha, dan G.S. Budhi. 2008. Konsorsium Penelitian: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani pada Berbagai Tipe Agroekosistem, Aspek Dampak Diversifikasi Usahatani terhadap Ketahanan Pangan dan Pendapatan Petani. Kerjasama Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan Universitas Padjadjaran Bandung.
- Pakpahan, A. 1989. Refleksi Diversifikasi dalam Teori Ekonomi. Makalah disampaikan pada Kongres dan Konpernas IX Perhepi. Jakarta, 12-16 Januari 1989. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta.
- Pingali, P. 2004. *Agricultural Diversification: Opportunities and Constraints*. FAO Rice Conference, Rome, Italy, 12-13 February 2004.
- Rao, P.O., P.S.Birthal, P.K. Joshi, and D. Kar. 2004. *Agricultural Diversification in India and Role of Urbanization*. MTID Discussion Paper No.77. International Food Policy Research Institute, Washington, USA.
- Rusastra, I W., dan H.P. Saliem, Supriyati dan Saptana. 2004. Prospek Pengembangan Pola Tanam dan Diversifikasi Tanaman Pangan di Indonesia. Forum Agro Ekonomi, 22(1): 27-53.
- Saptana, Susmono, Suwanto, dan M.Nur. 2003. Kinerja Kelembagaan Agribisnis Beras di Jawa Barat. Makalah disampaikan pada seminar "Penyusunan Profil Investasi dan Pengembangan Agribisnis Beras di Jawa Barat. Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, November 2003, di Bandung.
- Siregar, M dan M. Suryadi. 2006. *Changes in Food Crop Diversification in Indonesia*. Monograph Series No. 27. 2006. Pusat Analisis sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Timmer, C. P. 1992. Agricultural Diversification in Asia: *Lessons from the 1980s and Issues for the 1990. dalam World Bank Technical Paper Number 180: Trends in Agricultural Diversification Regional Perspective*. Editor: Shawki Barghouti, Lisa Garbus, dan Dina Umali. The World Bank, Washington, D.C.